

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1983.
- Budiono, Herlian, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 3.
- Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni, 1986.
- _____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2019,
- H Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Cetakan Kesatu, Bandung, Refika Aditama, 2019.
- Indrajaya, Rudi, dkk, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Bengkulu, Refika Aditama, 2020.
- _____, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya, PT Revka Petra Media, 2016.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- Prayudi, Guse, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Mataram, Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- _____, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Cetakan Kedua, Mataram, Rajawali Pers, 2016.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Kesatu, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Edisi Keenam PT. Pradnya Paramitha, 2005.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2001.

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022.

Tanuwidjaja, Henny, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Notariat*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung 2012.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Andhara, Marsya Putri, “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PDT/2016)”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Azzahra, Vera Fatimah “Implikasi Ketidakjelasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (Studi Kasus: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 05 yang Dibuat Oleh Notaris R di Caturharjo, Sleman, D. I. Yogyakarta)”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2023.

Dewi, Kharisma, “Analisis Yuridis Surat Kuasa Menjual Pada Akta Perikatan Jual Beli Belum Lunas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 757/PK/Pdt/2018)”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Latumeten, Pieter, “Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep Volmacht dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, Depok, Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 1, 2017.

Paendong, Kristiane & Taunaumang, Herts “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata”, Manado, Jurnal Lex Privatum UNSRAT, 2020.

Papendang, Christian E, “Penyerahan Hak Milik pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Praktik”, Lex Privatum Vol.I/No.02/Apr-Jun, Manado, 2013.

Sandita Nugraha, I Nyoman, *Kedudukan Surat Kuasa Menjual Mutlak di Bawah Tangan Sebagai Bentuk Jaminan (Studi Kasus di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur)*, Yogyakarta, Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

Setyawan, Alfis, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet", Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 1, 2016.

Widia, I Ketut dkk, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian", Denpasar, Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 16 Nomor:1, 2022.

Wildan, Muhammad, dkk, "Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum Bersertipikat", Tegal, Diktum Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, 2020.

Yuanitasari, Deviana, "Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen", Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Beserta Perubahannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

D. Internet

Adhitama, Satrya, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) versus Akta Jual Beli (AJB)", <http://satryaadhitama.blogspot.com/2013/06/perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb.html> (diakses tanggal 7 Maret 2024).

Hukum Online, "Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/> (diakses tanggal 23 Mei 2024).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Formasi Surat Gugatan Perdata", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html>